RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

KECAMATAN SIDAMULIH

KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN SIDAMULIH
e-mail : sidamulihkec11@gmail.com
Jalan Raya Sidamulih No. 80. Tlp. (0265) 639858 KodePos 46365

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/ 30 / Kpts -Kec/2025

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2025

CAMAT SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan bertanggungjawab maka perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata CaraSidamulih RPJPD, RPJMD dan RKPD, dipandang perlu menyusun Penetapan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Keputusan Camat;

: b. bahwa berdasarkan pertimbangana sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
25. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
27. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
28. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
29. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 9);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
50. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
51. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 23);
52. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 25);
53. Surat Keputusan Camat Sidamulih Kabupaten Pangandaran Nomor : 050/ 28 / Kpts -Kec/2025 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

KETIGA : Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran adalah sebagai pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sidamulih
Pada Tanggal : 07 Juli 2025

CAMAT SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN

MEGA RIJUA PARLUMI, SE.,MM
NIP. 19770210 200901 1 007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) yang telah ditetapkan untuk Tahun anggaran 2025.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja ini didalamnya merupakan penentuan indikator kinerja yangdapat terukur secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian dantingkat keberhasilan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Dalam penyusunannya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini kami telah berupaya semaksimal mungkin walaupun dalam proses penyusunannya kami mengalami hambatan, serta keterbatasan yang ada, harapan kami semoga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) inidapat dijadikan acuan oleh semua fihak yang berkepentingan sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya pencapaian hasil yang terbaik bagi setiap program kegiatan yang dilaksanakan.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran ini kami sadari masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan didalamnya, untuk itukami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tentunya masukan ataupun saran yang membangun akan senantiasa kami akomodir guna perbaikan dan peningkatan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) di masa yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaranini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna, serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada Kantor Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di : Sidamulih
Pada Tanggal : 07 Juli 2025

CAMAT SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN

MEGI REJA PARLUMI, SE.,MM
NIP. 19770210 200901 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I. PENDAHULUAN 3

1.1 LATARBELAKANG 3

1.2 LANDASAN HUKUM 3

1.3 MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN 7

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN..... 8

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA SKPD TAHUN LALU..... 9

2.1 EVALUASI RENJA SAMAPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 9

2.2 PERMASALAHAN YANG ADA PADA SKPD..... 13

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN..... 15

3.1 PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025 17

BAB IV. PENUTUP 20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengedalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan tersebut secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran maka disusunlah Renja Kecamatan Sidamulih tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2025 Kecamatan Sidamulih adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
13. Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
24. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
26. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
28. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
29. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
30. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 9);
49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
50. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
51. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
52. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 23);
53. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 25);
54. Surat Keputusan Camat Sidamulih Kabupaten Pangandaran Nomor : 050/ 28 / Kpts -Kec/2025 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Renja Kecamatan Sidamulih dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat progam dan kegiatan pembangunan daerah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun dalam pembinaan kemasyarakatan terutama pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi tolak ukur penilian kinerja Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat Sidamulih selama tahun 2025.
2. Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Sidamulih Tahun 2025 adalah sebagai acuan kecamatan dalam mengoperasionalisasikan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya dalam mencapai Visi misi jangka menengah daerah kabupaten pangandaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan sistematika sebagai berikut :

I. Pendahuluan
   - 1.1. Latar Belakang
   - 1.2. Landasan Hukum
   - 1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan
   - 1.4. Sistematika Penulisan

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2025
   - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2025
   - 2.2. Permasalahan Yang Ada Pada SKPD

III. Rencana Perubahan Program dan Kegiatan
   - 3.1. Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025

IV. Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SIDAMULIH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Pelaksanaan Renja Kecamatan Sidamulih tahun 2025 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada kecamatan. Tugas pokok kecamatan berdasar Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran yaitu Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan, adapun fungsi dari Kecamatan Sidamulih adalah :

a) Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
b) Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok seperti di atas.
d) Melaksanakan tugas-tugas ketata usahaan.
e) Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan.
f) Melaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SIDAMULIH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rancangan Kerja Kecamatan Sidamulih tahun 2025,pelaksanaan kinerja Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran ditunjang dengan Program,kegiatan dan sub kegiatan dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 1.399.908.232,-

Adapun Pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2025 di Kecamatan Sidamulih antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 1.351.618.732,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 434.449.210,- yang diimplementasikan ke dalam 8 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:
    1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 3.400.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 3.400.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Jumlah SDM Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD.

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 3.400.000,-dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 3.400.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Jumlah SDM Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 1.045.714.049,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 372.282.997,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 1.042.314.049,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 368.882.997,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 3.400.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 3.400.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 3.400.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 3.400.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 3.400.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 3.400.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 2.800.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 2.800.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah diLingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan iniadalah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
   a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 2.800.000 dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 2.800.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.
5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 21.454.683,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 6.113.000 dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan iniadalah Terlaksananya Administrasi perkantoran yang Akuntabel dan Transfaran.
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 21.454.683,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 6.113.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Administrasi perkantoran yang Akuntabel dan Transfaran.
6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan JumlahAnggaran yaitu sebesar Rp. 116.600.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 32.993.513,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja AparaturPemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 270.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah diLingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatanini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik denganJumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 25.500.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 7.423.513,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan AdministrasiPerkantoran.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 89.700.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 25.300.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 158.250.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 13.459.700,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 35.450.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 13.174.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 2.800.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 285.700,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 28.289.500,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 28.289.500,- yang diimplementasikan ke dalam 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 28.289.500,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 28.289.500,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan KabupatenPangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah dan Jumlah SDM Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD.

   a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 28.289.500,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 28.289.500,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Jumlah SDM Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD.

2.2 PERMASALAHAN YANG ADA PADA SKPD

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sidamulih bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepadaCamat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati Pangandarankepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategisdalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pangandaran;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikanCompany/Coorperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu SPM (Standar Pelayanan Minimal) dimana pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat mencapai MDGs (Millenium Develompment Goals);
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Arah Kebijakan dan potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Sidamulih harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjawab isu-isu tersebut, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap tahun selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal antara bidang dan sib bidang meupun eksternal dengan SKPD lain di tingkat daerah dan masyarakat publik. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk bimbinganteknis, seminar dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perencanaan.

Selain itu, dengan adanya peluang kerjasama antar pemerintah dan masyarakat terkaitImplementasi kebijakan Peraturan Daerah, diharapkan Kecamatan Sidamulih dapat terus menjalin kerjasama yang baik supaya kebijakan tersebut dapat dilaksankan di wilayah Kecamatan Sidamulih agar dapat menjadikan kemudahan dalam penyampaian kebijakan Darah terhadap masyarakat sekitar yang sesuai dengan keadaan pembangunan di Kecamatan Sidamulih.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, kecamatan didorong agar dapat mengoptimalkan berbagai pendekatan dalam menyusun perencanaan pembangunan di Kabupaten Pangandaran yaitu Pendekatan politik, teknokrasi, partisifasi, top down dan battom up. Namun demikian dengan dukungan sumberdaya manusia dan sarana prasaranayang baik serta peraturan perundang-undangan yang semakin lengkap maka tantangan itusecara bertahap dan berkeninambungan akan dapat dipenuhi.

BAB III
RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Sidamulih maka program-program yangakan dilaksanakan pada Perubahan Renja Tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

B. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnyamaka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :
   1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
      a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
         - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
         - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
         - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
         - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
      d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
         - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
      e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
         - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
         - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
         - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
         - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
      g) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
         - Pengadaan Mebeul
         - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
         - Pengadaan Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
      h) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
         - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
         - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
         - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
      i) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
         - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
         - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
         - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunaan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan :
   a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
      - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan :
   a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa
      - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Kegiatan lain yang tidak masuk anggaran SKPD antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, meliputi :
   a. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional
   b. Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan
2. Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, meliputi :
   a. Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa dan Kecamatan
   b. Pembinaan Desa
   c. Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
   d. Pembinaan untuk RT/RW di Kecamatan Sidamulih
3. Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pemukiman dan Perumahan, meliputi :
   a. Monitoring kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   b. Evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3.1. Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025

Perubahan Program dan Kegiatan Renja Kecamatan Sidamulih Tahun 2025 adalah :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang semula Rp. 1.180.816.500,- menjadi Rp. 1.327.558.732,-
   a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang semula Rp. 21.000.000,- menjadi Rp. 3.400.000,-
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang semulaRp. 21.000.000,- menjadi Rp. 3.400.000,-
   b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang semula Rp. 1.011.862.511,- menjadi Rp. 1.021.654.049,-
      - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, yang semula Rp. 900.862.511,- menjadi Rp. 1,018,254,049,-
      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yangsemula Rp. 21.000.000,- menjadi Rp 3,400,000,-
   c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang semula Rp. 21.000.000,- menjadi Rp. 3,400,000,-
      - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang semula Rp. 21.000.000,-menjadi Rp. 3.400,000,-
   d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang semula Rp. 17.400.000,- menjadi Rp. 2.800,000,-
      - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang semula Rp. 17.400.000,- menjadi Rp 2,800,000,-
   e) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang semula Rp. 13.949.989,- menjadi Rp. 21.454.683,-
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang semula Rp. 13.949.989,- menjadi Rp. 21.454.683,-

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang semula Rp. 79.100.000,- menjadi Rp. 116.600.000,-
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang semula Rp. 1.400.000,- menjadi Rp. 1.400.000,-
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang semula Rp. 25,500,000,- menjadi Rp. 25.500,000,-
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang semula Rp. 52.200.000,-menjadi Rp. 89.700.000,-

g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang semula Rp. 16.504.000,- menjadi Rp. 158.250.000,-
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang semula Rp. 15.004.000,- menjadi Rp. 35.450.000,-
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang semula Rp. 1.500.000,- menjadi Rp. 2,800,000,-

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang semula Rp. 0,- menjadi Rp. 20.000.000,-
   a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang semula Rp. 0,- menajdi Rp. 20.000.000,-
      - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang semula Rp. 20.000.000,- menjadi Rp. 0,-
      - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang semula Rp. 0,- menjadi Rp. 20.000.000,-

3) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang semula Rp. 24.143.500,- menjadi Rp. 28.289.500,-
   a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang semula Rp. 24.143.500,- menjadi Rp. 28.289.500,-
      - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang semulaRp. 24,143,500,- menjadi Rp. 28.289.500,-

BAB IV
PENUTUP

Dengan disusunnya Penetapan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 diharapkan akan memberikan arahan atau "guidance" serta sebagai tolok ukur dalam menjalankan kinerja Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

Selain itu dukungan dari semua pihak terutama jajaran staf Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas di berbagai bidang(pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya , Perubahan Rencana Kerja bukan mutlak tetapi harus dievaluasi secara periodik dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Pangandaran. Agar pendayaguna aparatur Negara Khususnya di Lingkungan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran nantinya dapat mewujudkan Kecamatan Sebagai Pusat Pemerintahan Didukung Pelayanan Profesional Dan Potensi Pariwisata Dengan Mempertahankan Kearipan Lokal Untuk Mewujudkan Kabupaten Pangandaran Sebagai Kabupaten Pariwisata Yang Mendunia.

Ditetapkan di : Sidamulih
Pada Tanggal : 07 Juli 2025

CAMAT SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN

MEGI RITUA PARLUMI, SE.,MM
NIP. 19770210 200901 1 007

No	Kode Rekening	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
											I		II		III		IV					
			Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	3.00	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100	
1		KECAMATAN SIDAMULIH				3,746,675,585		2,167,094,524		1,279,908,232	20.16	258,061,659	13.78	176,387,551	-	-	-	-		434,449,210		33.94
2		UNSUR KEWILAYAHAN				3,746,675,585		2,167,094,524		1,279,908,232	20.16	258,061,659	13.78	176,387,551	-	-	-	-		434,449,210		33.94
3		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100.00	3,138,002,519	100.00	2,095,924,886	100	1,231,618,732	20.95	258,061,659	14.32	176,387,551	-	-	-	-	35.27	434,449,210	35.27	35.27
4		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100.00	90,086,872	100.00	81,356,100	100	3,400,000	100.00	3,400,000	-	-	-	-	-	-	100.00	3,400,000	100.00	100.00
5		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	14.00	78,074,597	4.00	70,976,700	4.00	3,400,000	1.00	3,400,000	-	-	-	-	-	-	1.00	3,400,000	25.00	100.00
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-
7		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1.00	2,662,000	1.00	2,419,800	-	-	-	-	-	-					-	-	-	#DIV/0!
8		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1.00	2,662,000	1.00	2,239,800	-	-	-	-	-	-					-	-	-	#DIV/0!
9		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1.00	2,662,000	1.00	2,239,800	-	-	-	-	-	-					-	-	-	#DIV/0!
10		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1.00	2,662,000	1.00	2,239,800	-	-	-	-	-	-					-	-	-	#DIV/0!
11		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5.00	1,364,275	5.00	1,240,200	-	-	-	-	-	-					-	-	-	#DIV/0!
																					Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	3.57	#DIV/0!
																					Predikat Kinerja	(SR)	#DIV/0!
12		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan denean baik	%	100.00	2,354,278,636	100.00	1,439,783,668	100.00	1,045,714,049	20.36	212,912,309	15.24	159,370,688	-	-	-	-	35.60	372,282,997	35.60	35.60
13		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	11.00	2,274,438,468	11.00	1,376,468,168	11.00	1,042,314,049	11.00	209,512,309	11.00	159,370,688	-	-	-	-	22.00	368,882,997	200.00	35.39
14		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60.00	77,425,734	3.00	61,120,700	3.00	3,400,000	1.00	3,400,000	-	-	-	-	-	-	1.00	3,400,000	33.33	100.00
15		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1.00	1,251,140	1.00	1,137,300	-	-		-	-	-					-	-	-	#DIV/0!
16		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	1.00	1,163,294	1.00	1,057,500	-	-		-	-	-					-	-	-	#DIV/0!
																					Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	58.33	#DIV/0!
																					Predikat Kinerja	(R)	#DIV/0!
17		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100.00	59,668,730	100.00	37,627,600	100.00	3,400,000	100.00	3,400,000	-	-	-	-	-	-	100.00	3,400,000	100.00	100.00
18		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12.00	6,069,360	12.00	5,517,600	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
19		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12.00	53,599,370	12.00	32,110,000	12.00	3,400,000	3.00	3,400,000	-	-	-	-	-	-	3.00	3,400,000	25.00	100.00
																					Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	12.50	#DIV/0!
																					Predikat Kinerja	(SR)	#DIV/0!
20		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	100.00	122,900,813	100.00	109,085,040	100.00	2,800,000	100.00	2,800,000	-	-	-	-	-	-	100.00	2,800,000	100.00	100.00
21		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	25.00	12,108,373	25.00	11,947,840	-	-		-	-	-					-	-	-	#DIV/0!
22		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12.00	33,275,000	1.00	26,960,000	1.00	2,800,000	3.00	2,800,000	-	-	-	-	-	-	3.00	2,800,000	300.00	100.00
23		Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	26.00	4,312,440	1.00	3,920,200	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
24		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Bedasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11.00	73,205,000	11.00	66,257,000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
																					Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	75.00	#DIV/0!
																					Predikat Kinerja	(S)	#DIV/0!
25		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	100.00	100,941,665	100.00	91,616,937	100.00	21,454,683	12.16	2,608,500	16.33	3,504,500	-	-	-	-	28.49	6,113,000	28.49	28.49
26		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	2.00	1,072,790	1.00	974,957	-	-		-	-	-					-	-	-	#DIV/0!
27		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	180.00	30,223,834	1.00	27,476,068	1.00	21,454,683	1.00	2,608,500	1.00	3,504,500	-	-	-	-	2.00	6,113,000	200.00	28.49
28		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	48.00	6,408,166	1.00	5,825,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
29		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	24.00	4,775,628	1.00	4,220,568	-	-		-	-	-					-	-	-	#DIV/0!
30		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	5.00	15,972,000	1.00	14,510,344	-	-		-	-	-					-	-	-	#DIV/0!
31		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36.00	42,489,247	6.00	38,610,000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
																					Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	33.33	#DIV/0!
																					Predikat Kinerja	(SR)	#DIV/0!
32		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	100.00	145,911,655	100.00	136,137,255	-	-		-		-					-	-	-	-
33		Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	16.00	8,818,655	3.00	8,016,944	-	-		-		-					-	-	-	#DIV/0!

No	Kode Rekening	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
											I		II		III		IV					
			Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	3.00	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%
34		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	42.00	123,783,000	7.00	112,659,816	-	-		-		-					-	-	-	#DIV/0!
35		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1.00	13,310,000	1.00	15,460,495	-	-		-		-					-	-	-	#DIV/0!
																				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	#DIV/0!
																				Predikat Kinerja	(SR)	#DIV/0!
36		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**%**	**100.00**	**187,855,743**	**100.00**	**104,572,146**	**100.00**	**116,600,000**	**24.02**	**28,005,150**	**4.28**	**4,988,363**	-	-	-	-	**28.30**	**32,993,513**	**28.30**	**28.30**
37		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	240.00	1,437,480	240.00	1,300,000	240.00	1,400,000	3.00	120,000	3.00	150,000	-	-	-	-	6.00	270,000	2.50	19.29
38		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Rekening	2.00	35,842,233	12.00	36,600,000	12.00	25,500,000	2.00	3,385,150	2.00	4,038,363	-	-	-	-	4.00	7,423,513	33.33	29.11
39		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	60.00	150,576,030	12.00	66,672,146	12.00	89,700,000	3.00	24,500,000	3.00	800,000	-	-	-	-	6.00	25,300,000	50.00	28.21
																				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	28.61	25.53
																				Predikat Kinerja	(SR)	(SR)
40		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**%**	**100.00**	**76,358,405**	**100.00**	**95,746,140**	**100.00**	**38,250,000**	**12.90**	**4,935,700**	**22.28**	**8,524,000**	-	-	-	-	**35.19**	**13,459,700**	**35.19**	**35.19**
41		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6.00	61,717,405	6.00	56,096,140	6.00	35,450,000	1.00	4,650,000	1.00	8,524,000	-	-	-	-	2.00	13,174,000	33.33	37.16
42		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6.00	7,986,000	14.00	7,250,000	14.00	2,800,000	1.00	285,700	-	-	-	-	-	-	1.00	285,700	7.14	10.20
43		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	14.00	4,658,500	14.00	4,500,000	-	-		-		-					-	-	-	#DIV/0!
44		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1.00	1,996,500	1.00	27,900,000	-	-		-		-					-	-	-	#DIV/0!
																				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	10.12	#DIV/0!
																				Predikat Kinerja	(SR)	#DIV/0!
																				Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**53.45**	**53.45**
																				Predikat Kinerja	**(R)**	**(R)**
45		**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**%**	**100.00**	**246,288,240**	**100.00**	**23,110,000**	**100.00**	**20,000,000**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
46		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**%**	**100.00**	**246,288,240**	**100.00**	**23,110,000**	**100.00**	**20,000,000**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
47		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5.00	17,888,640	12.00	4,380,000	-	-		-		-					-	-	-	#DIV/0!
48		Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	66.00	228,399,600	12.00	18,730,000	12.00	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-
																				Predikat Kinerja	(SR)	(SR)
																				Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-
																				Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**
49		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**%**	**100.00**	**4,305,785**	**100.00**	**3,914,100**	-	-		-		-					-	-		
50		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**%**	**100.00**	**4,305,785**	**100.00**	**3,914,100**	-	-		-		-					-	-		
51		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	7.00	4,305,785	7.00	3,914,100	-	-		-		-					-	-		
																				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-
																				Predikat Kinerja	(SR)	(SR)
																				Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-
																				Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**
52		**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum**	**%**	**100.00**	**4,305,785**	**100.00**	**3,910,000**	-	-		-		-					-	-	-	-
53		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum**	**Kali**	**7.00**	**4,305,785**	**100.00**	**3,910,000**	-	-		-		-					-	-		
54		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	7.00	4,305,785	12.00	3,910,000	-	-		-		-					-	-		
																				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-
																				Predikat Kinerja	(SR)	(SR)
																				Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-
																				Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**
55		**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**%**	**100.00**	**4,638,535**	**100.00**	**4,200,000**	-	-		-		-					-	-		
56		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan**	**Kali dan %**	**5.00**	**4,638,535**	**100.00**	**4,200,000**	-	-		-		-					-	-		
57		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen semua urusan pemerintahaan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikan	Dokumen	10.00	4,638,535	10.00	4,200,000	-	-		-		-			-	-	-	-		
																				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-
																				Predikat Kinerja	(SR)	(SR)
																				Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-
																				Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**
58		**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**%**	**100.00**	**349,134,721**	**100.00**	**36,035,538**	**100.00**	**28,289,500**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59		**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa**	**%**	**100.00**	**349,134,721**	**100.00**	**36,035,538**	**100.00**	**28,289,500**	-	-	-	-					-	-	-	-
60		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	7.00	3,191,738	7.00	2,901,400	-	-		-		-					-	-	-	#DIV/0!
61		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	42.00	53,330,508	7.00	26,009,138	7.00	28,289,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	7.00	17,888,640	5.00	7,125,000	-	-		-		-					-	-	-	-
																				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	#DIV/0!
																				Predikat Kinerja	(SR)	#DIV/0!
																				Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-
																				Predikat Kinerja	**(SR)**	**(SR)**
																				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)	**8.82**	**8.82**
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**(SR)**	**(SR)**

No	Kode Rekening	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
											I		II		III		IV					
			Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	3.00	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
Kinerja	Rp	Kinerja	%		
14 = 6+12		15 = 14/5*100		16	17
-	**2,601,543,734**	-	**69.44**		
-	**2,601,543,734**	-	**69.44**		
67.64	**2,530,374,096**	**67.64**	**80.64**	Kec. Sidamulih	
100.00	**84,756,100**	**100.00**	**94.08**	Kec. Sidamulih	
5.00	74,376,700	35.71	95.26	Kec. Sidamulih	
-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Kec. Sidamulih	
1.00	2,419,800	100.00	90.90	Kec. Sidamulih	
1.00	2,239,800	100.00	84.14	Kec. Sidamulih	
1.00	2,239,800	100.00	84.14	Kec. Sidamulih	
1.00	2,239,800	100.00	84.14	Kec. Sidamulih	
5.00	1,240,200	100.00	90.91	Kec. Sidamulih	
67.80	**1,812,066,665**	**67.80**	**76.97**		
33.00	1,745,351,165	300.00	76.74	Kec. Sidamulih	
4.00	64,520,700	6.67	83.33	Kec. Sidamulih	
1.00	1,137,300	100.00	90.90		
1.00	1,057,500	100.00	90.91		
100.00	**41,027,600**	**100.00**	**68.76**		
12.00	5,517,600	100.00	90.91	Kec. Sidamulih	
15.00	35,510,000	125.00	66.25		
100.00	**111,885,040**	**100.00**	**91.04**		
25.00	11,947,840	100.00	98.67		
4.00	29,760,000	33.33	89.44	Kec. Sidamulih	
1.00	3,920,200	3.85	90.90		
11.00	66,257,000	100.00	90.51		
64.25	**97,729,937**	**64.25**	**96.82**		
1.00	974,957	50.00	90.88	Kec. Sidamulih	
3.00	33,589,068	1.67	111.13	Kec. Sidamulih	
1.00	5,825,000	2.08	90.90	Kec. Sidamulih	
1.00	4,220,568	4.17	88.38	Kec. Sidamulih	
1.00	14,510,344	20.00	90.85		
6.00	38,610,000	16.67	90.87	Kec. Sidamulih	
50.00	**136,137,255**	**50.00**	**93.30**		
3.00	8,016,944	18.75	90.91		

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
Kinerja	Rp	Kinerja	%		
7.00	112,659,816	16.67	91.01	Kec. Sidamulih	
1.00	15,460,495	100.00	116.16		
64.15	**137,565,659**	**64.15**	**73.23**		
246.00	1,570,000	102.50	109.22	Kec. Sidamulih	
16.00	44,023,513	800.00	122.83	Kec. Sidamulih	
18.00	91,972,146	30.00	61.08	Kec. Sidamulih	
67.59	**109,205,840**	**67.59**	**143.02**		
8.00	69,270,140	133.33	112.24	Kec. Sidamulih	
15.00	7,535,700	250.00	94.36	Kec. Sidamulih	
14.00	4,500,000	100.00	96.60	Kec. Sidamulih	
1.00	27,900,000	100.00	1,397.45	Kec. Sidamulih	
50.00	**23,110,000**	**50.00**	**9.38**		
50.00	**23,110,000**	**50.00**	**9.38**	Kec. Sidamulih	
12.00	4,380,000	240.00	24.48		
12.00	18,730,000	18.18	8.20	Kec. Sidamulih	
50.00	**3,914,100**	**50.00**	**90.90**		
50.00	**3,914,100**	**50.00**	**90.90**		
7.00	3,914,100	100.00	90.90	Kec. Sidamulih	
50.00	**3,910,000**	**50.00**	**90.81**		
100.00	**3,910,000**	**1,428.57**	**90.81**		
12.00	3,910,000	171.43	90.81	Kec. Sidamulih	
50.00	**4,200,000**	**50.00**	**90.55**		
100.00	**4,200,000**	**2,000.00**	**90.55**		
10.00	4,200,000	100.00	90.55	Kec. Sidamulih	
50.00	**36,035,538**	**50.00**	**10.32**		
50.00	**36,035,538**	**50.00**	**10.32**		
7.00	2,901,400	100.00	90.90	Kec. Sidamulih	
7.00	26,009,138	16.67	48.77	Kec. Sidamulih	
5.00	7,125,000	71.43	39.83		

Pangandaran 2025

Kepala Bappeda

Kabupaten Pangandaran

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
Kinerja	Rp	Kinerja	%		

H.M. AGUS SATRIADI S.PT.MP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19660902 199601 1 002

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. PANGANDARAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN SIDAMULIH							**1.204.960.000,00**	**1.179.271.122,00**	**1.375.848.232,00**	**170.888.232,00**							**23.143.719.326,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.204.960.000,00**	**1.179.271.122,00**	**1.375.848.232,00**	**170.888.232,00**							**23.143.719.326,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.204.960.000,00**	**1.179.271.122,00**	**1.375.848.232,00**	**170.888.232,00**							**23.143.719.326,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi; 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik; 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur; 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**1.180.816.500,00**	**1.130.981.622,00**	**1.327.558.732,00**	**1.904.239.267,00**							**3.085.055.767,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*1. Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun tepat waktu; 2. Persentase Dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu; 3. Persentase Dokumen Evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu*				100 %	100 %	21.000.000,00	0,00	3.400.000,00	-17.600.000,00			-	- -	Kecamatan Sidamulih		85.882.056,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	14 Dokumen	21.000.000,00	0,00	3.400.000,00	-17.600.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PINJAMAN DAERAH DARI LKB	-	- -			85.882.056,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Unit Kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik*				100 %	100 %	1.011.862.511,00	963.076.939,00	1.021.654.049,00	9.791.538,00			-	- -	Kecamatan Sidamulih		2.587.050.623,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	990.862.511,00	963.076.939,00	1.018.254.049,00	27.391.538,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PINJAMAN DAERAH DARI LKB	-	- -			2.501.882.315,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60 Dokumen	60 Dokumen	21.000.000,00	0,00	3.400.000,00	-17.600.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PINJAMAN DAERAH DARI LKB	-	- -			85.168.308,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik*				100 %	100 %	21.000.000,00	0,00	3.400.000,00	-17.600.000,00			-	- -	Kantor Kecamatan Sidamulih Kecamatan Sidamulih		58.959.307,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	21.000.000,00	0,00	3.400.000,00	-17.600.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PINJAMAN DAERAH DARI LKB	-	- -			58.959.307,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik*				100 %	100 %	17.400.000,00	0,00	2.800.000,00	-14.600.000,00			-	- -	Kecamatan Sidamulih		36.602.500,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	17.400.000,00	0,00	2.800.000,00	-14.600.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PINJAMAN DAERAH DARI LKB	-	- -			36.602.500,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik*				100 %	100 %	13.949.989,00	21.454.683,00	21.454.683,00	7.504.694,00			-	- -	Kecamatan Sidamulih		33.246.218,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.949.989,00	21.454.683,00	21.454.683,00	7.504.694,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			33.246.218,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintahan yang disediakan*				100 %	100 %	79.100.000,00	108.200.000,00	116.600.000,00	37.500.000,00			-	- -	Kecamatan Sidamulih		206.641.317,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				240 Laporan	240 Laporan	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.581.228,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			39.426.456,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	52.200.000,00	81.300.000,00	89.700.000,00	37.500.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PINJAMAN DAERAH DARI LKB	-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik			165.633.633,00	KECAMATAN SIDAMULIH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi*				100 %	100 %	16.504.000,00	38.250.000,00	158.250.000,00	141.746.000,00			-	- -	Kantor Kecamatan Sidamulih		76.673.746,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	15.004.000,00	35.450.000,00	35.450.000,00	20.446.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			67.889.146,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	1.500.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	1.300.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.784.600,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**							**1.204.960.000,00**	**1.179.271.122,00**	**1.375.848.232,00**	**170.888.232,00**							**23.143.719.326,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01	**KECAMATAN**							**1.204.960.000,00**	**1.179.271.122,00**	**1.375.848.232,00**	**170.888.232,00**							**23.143.719.326,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000.000,00**							**20.000.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koodinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	-		20.000.000.000,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				-	0 Laporan	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik			0,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik			20.000.000.000,00	KECAMATAN SIDAMULIH
2.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**100 %**	**100 %**	**24.143.500,00**	**28.289.500,00**	**28.289.500,00**	**34.520.059,00**							**58.663.559,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				100 %	100 %	24.143.500,00	28.289.500,00	28.289.500,00	4.146.000,00			-	- -	Kecamatan Sidamulih		58.663.559,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				7 Dokumen	7 Dokumen	24.143.500,00	28.289.500,00	28.289.500,00	4.146.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			58.663.559,00	KECAMATAN SIDAMULIH
	J U M L A H								**1.204.960.000,00**	**1.179.271.122,00**	**1.375.848.232,00**	**-467.827.499.563,79**							**23.143.719.326,00**	